

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Arsyad,1997:57)

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan suatu proses yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat diberbagai sektor. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang memperhatikan dan memperhitungkan pola kehidupan yang sedang berlangsung dimasyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan pada saat itu juga diberlakukannya UU Otonomi Daerah sejak 1 januari 2001 yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang menitik beratkan pada daerah atau kota harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah disini adalah bahwa daerah kabupaten/kota memiliki *self sufficiency* dan *self goferment*, diatur dan diurus oleh pemerintah daerah setempat

Mulai tahun 2004 UU Nomor 22 tahun 1999 mengalami revisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menitik beratkan pada penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah paling tidak terdapat 4(empat) elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Keempat elemen tersebut menurut *cheema* dan *Rondellini* (1989) adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrative dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif sehingga dengan demikian akan terjadi kemandirian atau kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif maka harus didukung sumber keuangan yang memadai.

Dalam pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian merupakan upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan meliputi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara. Di tengah kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, peranan dan kemampuan daerah terus diusahakan untuk lebih ditingkatkan. selaras dengan pembangunan nasional, serta untuk mewujudkan daerah otonom yang nyata serta bertanggung jawab, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata diseluruh wilayah, oleh karena itu pembangunan dilaksanakan di Indonesia tidak saja ditinjau regional saja, tetapi juga di daerah (regional)

Dalam pembangunan yang mencakup segi kenaikan laju ekonomi, sangat membutuhkan dana dalam pelaksanaannya, begitu juga dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu juga memerlukan biaya yang cukup besar. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan berasal dari berbagai sumber, yang dalam pengalokasiannya diperlukan adanya keterpaduan antar sumber dana itu sendiri. Selain dukungan pembiayaan pembangunan berasal dari sektor pemerintah, peran serta masyarakat dan dunia usaha merupakan tumpuan harapan yang besar bagi pembangunan ekonomi daerah, oleh karena itu dalam perkembangan nanti kegiatan pembangunan sebanyak mungkin harus ditangani masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut secara umum adalah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam upaya mencapai kemajuan dan kemandirian.

Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dalam sistem hubungan pusat daerah, agar beban pemerintah pusat dalam pembangunan nasional dapat dikurangi. Keuangan daerah mempunyai arti penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah, kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pembangunan sub sektor keuangan daerah dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan, diperluas dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber pembiayaan daerah untuk mendukung otonomi daerah, karena selama ini pada umumnya kita menghubungkan daerah.

Adanya permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dalam sistem hubungan pusat daerah, agar beban pemerintah pusat dalam pembangunan nasional dapat dikurangi. Keuangan daerah mempunyai arti penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kegiatan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena saat ini otonomi daerah harus lebih didasarkan pada kemampuan fisik, yaitu suatu kemampuan membiayai dirinya sendiri untuk menyelenggarakan otonomi. Tujuan pemberian otonomi sendiri adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan suatu proses dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses lajunya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan menggunakan tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali menjadi ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. (Sadono, 181;23)

Pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun dapat dijadikan indikator suatu keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa

Dari setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas memberikan kontribusi pendapatan yang berbeda sesuai dengan hasil perencanaan serta pertumbuhan sektor yang dilaksanakan oleh daerah.

Sejak tahun 2000 dan 2001 perkembangan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Banyumas tidak begitu berbeda, tetapi yang membedakan adalah pertumbuhan ekonomi per sektor. Sedangkan jika kita perhatikan kontribusi terbesar untuk Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh sektor pertanian. Gambaran inilah yang menarik penulis untuk meneliti perkembangan Kabupaten Banyumas terhadap Propinsi Jawa Tengah dengan judul **ANALISIS SEKTOR POTENSI EKONOMI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1998-2004**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas lebih lanjut adalah :

- a. Seberapa besar sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
- b. Sektor ekonomi manakah yang merupakan sektor potensial yang menyumbang untuk PDRB Kabupaten Banyumas

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis keunggulan sektor-sektor dalam perekonomian Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan kemampuan dan pengetahuan sekaligus menghayati keadaan sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang akan datang